

TINJAUAN LITERATUR SEMANGAT WIRAUSAHA SOSIAL KADER PKK DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

Natalia Sari Pujiastuti¹

¹Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Informatika dan Komunikasi Universitas Semarang

¹Email: natalia@usm.ac.id

Abstract: *This research analyses the spirit of social entrepreneurship among the administrators of Empowerment and Family Welfare Organizations (PKK Cadres) through the Family Income Enhancement Program (UP2K-PKK). Detailing the concept of social entrepreneurship through a literature review, the study seeks to understand how the spirit of social entrepreneurship can act as a catalyst for family economic empowerment. The literature analysis covers the characteristics of social entrepreneurship, the role of PKK Cadres in the implementation of UP2K-PKK, and its impact on community development. The hope is that the results of this research can provide in-depth insights into the contribution of the spirit of social entrepreneurship in enhancing the effectiveness of UP2K-PKK. Additionally, the research findings are expected to serve as a foundation for strengthening the role of PKK cadres in realizing family economic empowerment programs.*

Keyword: *Family Income; Kader PKK; UP2K-PKK; Social Entrepreneurship*

Abstraksi: Penelitian ini menganalisis semangat wirausaha sosial di kalangan Kader PKK melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK). Merinci konsep wirausaha sosial melalui tinjauan literatur, penelitian ini bertujuan memahami sejauh mana semangat wirausaha sosial dapat menjadi katalisator bagi pemberdayaan ekonomi keluarga. Analisis literatur mencakup karakteristik wirausaha sosial, peran Kader PKK dalam implementasi UP2K-PKK, dan dampaknya terhadap pembangunan komunitas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang kontribusi semangat wirausaha sosial dalam meningkatkan efektivitas UP2K-PKK, serta menjadi landasan untuk memperkuat peran Kader PKK dalam merealisasikan program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Kata kunci: Ekonomi Keluarga; Kader PKK; UP2K-PKK; Wirausaha Sosial

Pendahuluan

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Indonesia menjadi kekuatan utama dalam melaksanakan pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional. PKK, sebagai organisasi kemasyarakatan, memiliki jangkauan dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan, dan dipimpin secara fungsional oleh istri pemimpin daerah (gubernur, bupati/wali kota, camat, kepala desa/lurah). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menjadi salah satu ikon *civil society* yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (Aslichati, 2011). Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menekankan bahwa PKK bukan hanya organisasi strategis, melainkan juga dapat menjadi pendorong perubahan sosial di masyarakat. Berbagai permasalahan di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dapat diatasi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga (<https://kominfo.jatimprov.go.id/>, 2023).

Kemampuan PKK dalam menangani permasalahan sosial didukung oleh Kader PKK yang mencapai pelosok desa dengan latar belakang pendidikan, keterampilan, dan profesi yang beragam (Aslichati, 2011). Suwadiono Winardi, staf ahli Tim Penggerak PKK Pusat, menekankan bahwa Kader PKK adalah individu yang memiliki kemauan, kemampuan, dan pemahaman untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK. Mereka bukan hanya mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, melainkan juga sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk mewujudkan program PKK (Amanah et al., 2023).

Kader PKK, yang dikenal sebagai Kader Khusus UP2K, memiliki peran sentral dalam meningkatkan efektivitas Program UP2K-PKK. Mereka perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengimplementasikan UP2K-PKK. Imbauan dari Wakil Ketua IV TP PKK Kabupaten Banjarnegara yang mendorong anggota PKK untuk memiliki pola pikir wirausaha, menunjukkan urgensi peran Kader PKK dalam memberdayakan ekonomi keluarga (Dinkominfo, 2022). Oleh karena itu, membangun semangat wirausaha sosial di kalangan Kader PKK menjadi krusial.

Wirausaha sosial, dalam konteks UP2K-PKK, dapat dilihat sebagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dan secara tidak langsung memberdayakan masyarakat. Memahami konsep wirausaha sosial menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran Kader PKK. Wirausaha sosial memiliki ciri khas, seperti fokus pada pencapaian tujuan sosial, inovasi dalam mencari solusi terhadap masalah sosial, dan semangat kolaboratif dalam membangun kemitraan (Dees, 2001).

Wirausaha sosial dapat memberikan dampak positif pada pembangunan komunitas. *Pertama*, melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan keluarga, wirausaha sosial dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Kedua*, inovasi yang muncul dari wirausaha sosial dapat menjadi pemicu perubahan positif dalam masyarakat. *Ketiga*, dengan pendekatan kolaboratif, wirausaha sosial dapat memperkuat jaringan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Penelitian sebelumnya oleh Khiftiyah & Nilamsari (2022) menyimpulkan bahwa UP2K berhasil meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan perubahan signifikan, terutama dalam peningkatan pendapatan, pengetahuan, dan relasi bagi anggota. Namun, program ini dianggap kurang efektif dalam pelaksanaannya, baik dari segi waktu maupun pelaksanaan yang tidak maksimal karena dilakukan hanya beberapa kali, tidak berkelanjutan (Nabila & Sonita, 2023). Hambatan lain yang ditemui dalam pelaksanaan UP2K di Tangkerang Utara Pekanbaru adalah dana program UP2K yang hanya diberikan kepada satu kelompok tertentu, tidak menyeluruh (Nurmasari & Eka Komalasari, 2023).

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tinjauan tentang semangat wirausaha sosial bagi Kader PKK melalui Program UP2K-PKK. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma yang berpusat pada manusia, partisipatif, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi tujuan strategis dalam pembangunan sosial, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan komunitas secara menyeluruh. Program PKK sebagai inisiatif pemerintah berperan dalam menyelesaikan permasalahan sosial melalui serangkaian program dan kegiatan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (2022–2023)

Judul Penelitian	Nama & Penerbit	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Peran Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Pada Era <i>New Normal</i> di Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru	Nurmasari, Komalasari (2023) Jurnal Niara Vol.16 No.1 Mei 2023 Hal 80 - 88	Tujuan Penelitian ini (1) menganalisis dan mendeskripsikan peran kader PKK sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dan (2) mengetahui faktor penghambat	Kualitatif, pengumpulan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi	Peran UP2K berjalan cukup baik dalam penguatan ekonomi keluarga. Hambatan: dana program UP2K hanya digulirkan ke satu kelompok untuk kelompok yang lain tidak digulirkan kembali ke masyarakat.

Proses Pemberdayaan Perempuan melalui Program UP2K pada masa pandemic Covid-19	Khiftiyah, Nilamsari Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 3 No.1 Feb 2022.	Tujuan Penelitian ini (1) Proses pemberdayaan Perempuan (2) dampak pelaksanaan bagi kehidupan masyarakat RW 01 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Kualitatif Pengumpulan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi	(1) Proses pemberdayaan tetap dilakukan secara <i>online</i> meskipun pada masa pandemi Covid-19. (2) Anggota UP2K tetap dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka (3) Terjadi perubahan yang dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan, pengetahuan, dan relasi bagi para anggota
Efektivitas Pemberdayaan Perempuan Melalui Program UPK-PKK di Desa Mojosarirejo Kecamatan Dryorejo	Hidayatin Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Inovasi Sektor Publik	Mengetahui efektivitas pemberdayaan perempuan melalui UP2K-PKK di Desa Mojosarirejo Kec. Dryorejo	Kualitatif, wawancara, observasi, dokumentasi	1) Efektivitas pemberdayaan perempuan melalui program UP2K-PKK di Desa Mojosarirejo belum berjalan dengan baik. 2) Pemberdayaan perempuan belum sesuai 3) Faktor penghambat minimnya modal simpan pinjam, pemasarn hasil produk yang terbatas, promosi media <i>online</i> yang belum maksimal
Pendampingan UP2K Kemuning dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Keluarga di Kelurahan Muncul Tangerang Selatan	Aisyah, Muhtadi Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 1-20	1) Mengetahui dampak dan peran dari UP2K 2) Mengetahui proses pemberdayaan masyarakat	Kualitatif Teknik wawancara mendalam	1) Program UP2K berperan penting dalam pemberdayaan Masyarakat 2) Ada 3 dampak yaitu dampak administratif, ekonomi dan sosial 3) Menghilangkan ketergantungan warga dari rentenir
Pemberdayaan Perempuan Melalui Program UP2K untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bunga Tanjung Kabupaten Kerinci	Fadilla Ulpa, Fatmariza Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 3 2020	Menganalisis pelaksanaan pemberdayaan Perempuan melalui program UP2K Usaha Setia di Desa Bunga Tanjung Kabupaten Kerinci	Kualitatif, wawancara, observasi dan dokumentasi	1. Program UP2K Usaha Setia terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program bernilai ekonomis dan berbentuk pemberdayaan 2. Kendala: partisipasi Perempuan masih rendah, karena kurang sosialisasi pelatihan dan rendahnya pendidikan perempuan

Program UP2K-PKK telah dijalankan, namun masih terdapat sejumlah kelemahan dan kekurangan dalam proses pemberdayaan, terutama pada tahap perencanaan dan monitoring kegiatan. Kendala ini disebabkan kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dari para pelaku usaha, yakni kelompok pelaksana, dan pendamping program, yaitu Kader UP2K (Khiftiyah & Nilamsari,

2022). Tujuan utama program ini adalah menempatkan semua usaha ekonomi, baik kelompok maupun perorangan, dengan harapan dapat mengatasi permasalahan sosial, misalnya kemiskinan. Program ini diarahkan untuk membina dan melatih masyarakat guna meningkatkan kemampuan mereka dalam rangka mencapai kesejahteraan keluarga. UP2K-PKK dianggap tepat sasaran dengan menargetkan keluarga tanpa pendapatan atau yang memerlukan peningkatan pendapatan usaha.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wirausaha sosial dapat diterapkan secara efektif dalam Program UP2K-PKK untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga?
2. Sejauh mana semangat wirausaha sosial di kalangan Kader PKK dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program UP2K-PKK?
3. Bagaimana peran konkret Kader PKK dalam mendukung inisiatif wirausaha sosial dan meningkatkan efektivitas Program UP2K-PKK?

Berdasarkan identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis penerapan secara efektif konsep wirausaha sosial dalam Program UP2K-PKK untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga?
2. Menganalisis sejauh mana semangat wirausaha sosial di kalangan Kader PKK dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program UP2K-PKK?
3. Menganalisis peran secara konkret Kader PKK dalam mendukung inisiatif wirausaha sosial dan meningkatkan efektivitas Program UP2K-PKK?

Kajian Teori

Wirausaha Sosial

Dalam konteks konsep kewirausahaan, terdapat unsur pemberdayaan atau *empowerment* yang menandakan pemberian kekuasaan, pengalihan kekuatan, atau delegasi otoritas kepada pihak lain. Lebih dari itu, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai usaha memberikan kemampuan. Kewirausahaan, dalam konteks ini, menjadi suatu usaha untuk memberikan kemampuan dan mengalihkan kekuatan individu menuju kemandirian (Santoso, dalam Listyorini, 2012). Definisi kewirausahaan sosial yang lebih komprehensif dan membantu untuk lebih memahami dan menganalisis kewirausahaan sosial berdasarkan 4 elemen disampaikan oleh (Hulgard, 2010) yang menyatakan bahwa kewirausahaan sosial mencakup empat elemen utama: penciptaan nilai sosial (baik luas maupun sempit, global atau lokal), partisipasi masyarakat sipil yang mengoptimalkan modal sosial, inovasi sosial berakar dari kearifan lokal, dan aktivitas ekonomi yang mendukung misi sosial. *Social Value* adalah elemen paling khas, menekankan penciptaan manfaat sosial nyata. *Civil Society* menggambarkan keterlibatan masyarakat sipil dalam mengatasi masalah sosial dan berkontribusi pada inisiatif kewirausahaan sosial. *Innovation* menyoroti pengembangan pendekatan baru terhadap masalah sosial, dan *Economic Activity* merujuk pada aktivitas ekonomi yang mendukung misi sosial. Penggabungan penciptaan nilai sosial dengan kegiatan ekonomi memungkinkan kewirausahaan sosial mencapai dampak jangka panjang dan keberlanjutan.

Dampak dari wirausaha sosial mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, memberikan kesempatan kerja dan pelatihan untuk kelompok masyarakat yang mengalami berbagai permasalahan seperti pengangguran, ketidakmampuan bekerja, dan diskriminasi gender. *Kedua*, membangun dan mengaplikasikan inovasi penting yang berkontribusi pada pengembangan sosial, ekonomi, serta

penciptaan produk baru. *Ketiga*, dalam ranah wirausaha sosial, terjadi akumulasi modal ekonomi sosial (*social capital*) sebagai nilai krusial dari kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Modal sosial (*social capital*), dalam konteks ini, menjadi esensi karena membangun kerja sama ekonomi memerlukan berbagi nilai, kepercayaan, dan kerja sama yang merupakan bagian dari modal sosial. Wirausaha sosial mendorong terwujudnya kesetaraan dalam masyarakat (Listyorini, 2012).

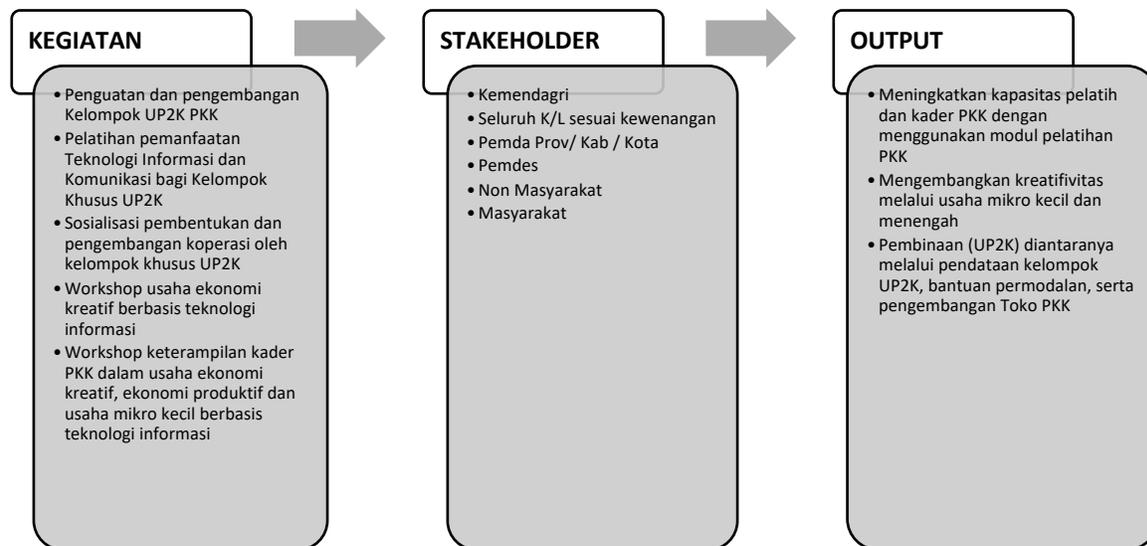
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup keluarga dan mencapai indikator kebutuhan pokok, pemberdayaan menjadi krusial. Pemberdayaan, yang berasal dari kata dasar "daya" yang berarti "kekuatan," dapat diartikan sebagai memberi daya atau kekuatan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan pemberian kekuatan kepada golongan yang tidak memiliki daya atau *powerless* (Hamid, 2018). Proses perencanaan yang baik menjadi kunci keberhasilan implementasi program pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai subjek pelaksanaan program, bukan sebagai objek, menjadi hal penting dalam pembuatan perencanaan pemberdayaan ekonomi. Ada tiga hal esensial yang perlu dilaksanakan, yaitu pengembangan (*enabling*), pemberdayaan (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Dalam konteks keluarga, pemberdayaan harus dipahami sebagai proses dan tujuan sekaligus, mengacu pada terwujudnya keluarga yang berdaya secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Pendekatan esensial dalam pemberdayaan masyarakat melibatkan identifikasi dan pengembangan potensi masyarakat, penguatan potensi melalui partisipasi, serta fokus pada perlindungan dan pembelaan terhadap kelompok yang lemah (Hamid, 2018). Pada intinya, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang memberikan kekuatan, membangun potensi, dan menciptakan kemandirian untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

Program Unggulan PKK Bidang Pendidikan dan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi tahun 2021–2024, Gelari Pelangi, memiliki 5 program unggulan, salah satunya adalah Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan, khususnya bagi kaum perempuan, dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha kelompok untuk meningkatkan pendapatan keluarga demi mewujudkan keluarga sejahtera. UP2K memberikan kesempatan kepada keluarga berpenghasilan rendah yang telah memiliki kegiatan usaha, tergabung dalam kelompok PKK, untuk menjadi mandiri dalam aspek ekonomi. Program ini berjalan sejak tahun 2014 dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota serta memberikan kesempatan pada pengusaha kecil untuk mengembangkan modal usahanya.

UP2K dijalankan oleh Kader Khusus PKK yang telah dilatih untuk membimbing, mengarahkan, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan kelompok. Kegiatan UP2K difokuskan pada keluarga-keluarga berpenghasilan rendah yang sudah memiliki kegiatan usaha dan tergabung dalam kelompok PKK. Seiring dengan pelaksanaannya, UP2K memberikan dana usaha kepada kelompok masyarakat, mengakomodasi aspek persiapan, pelaksanaan, dan pengembangan usaha. Dalam keseluruhan program UP2K, terdapat kegiatan, stakeholder, dan output yang mencerminkan upaya nyata dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, UP2K-PKK menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan mencapai tujuan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Program ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan kelompok masyarakat yang sejalan dengan konsep pemberdayaan dan tujuan kewirausahaan sosial. (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat & PKK, 2021)



Gambar 1. Kegiatan, stakeholder, dan output program UP2K

Sumber: olahan penulis (2023)

Metode Penelitian

Metode merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Penelitian ini menggunakan studi literatur, peneliti mengeksplorasi prinsip pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai bagian dari program. Studi literatur, sebagai teknik pengumpulan data, dilakukan dengan melalui analisis buku, literatur, catatan, dan laporan terkait dengan masalah yang dibahas.

Menurut Kriyantono (2008), studi literatur adalah tahap krusial di mana peneliti menentukan topik penelitian dan melakukan kajian terkait. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan, yaitu buku, jurnal, majalah, tesis, disertasi, serta sumber lain misalnya internet dan koran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data dari literatur terkait dengan topik. Data yang terkumpul dianalisis dengan mendeskripsikan fakta-fakta dan memberikan pemahaman. Setelah mendapatkan kepustakaan yang relevan, disusun secara sistematis untuk digunakan dalam penelitian. Fokus penulisan artikel ini adalah pada inovasi, kolaborasi, pengembangan jaringan, dan peluang baru dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat dalam pelaksanaan program PKK.

Hasil dan Pembahasan

Organisasi PKK, yang awalnya bernama "Pendidikan Kesejahteraan Keluarga" pada tahun 1961, mengalami perubahan menjadi "Pembinaan Kesejahteraan Keluarga" pada tahun 1972, dan kemudian berkembang menjadi "Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga" pada tahun 2000. Transformasi ini tidak hanya sebatas pergantian nama, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi kunci pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan PKK bahwa pemberdayaan keluarga harus diutamakan dengan penanganan yang terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas, dengan berlandaskan pada kearifan lokal (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat & PKK, 2021).

Keluarga menjadi subjek utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan PKK melalui 10 Program PKK, yang mencakup Pembinaan Karakter Keluarga, Pendidikan, Peningkatan Ekonomi Keluarga, Penguatan Ketahanan Keluarga, hingga Kesehatan Keluarga dan Lingkungan. Sebagai organisasi kemasyarakatan lokal, PKK telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis dengan konsep pemberdayaan.

Tantangan dan Peluang dalam Pelaksanaan Program PKK

Meskipun memiliki sejarah yang panjang dan terus aktif (sejak 1967), PKK sebagai penyelenggara program menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan efektivitasnya. Buku 2 Strategi Gerakan Program PKK (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat & PKK, 2021), mengungkapkan beberapa kekurangan internal yang perlu diperbaiki. Diantaranya adalah kurangnya bimbingan teknis/pembinaan/pelatihan SDM PKK, belum optimalnya tata kelola administrasi, masih adanya program kegiatan seremonial yang kurang substansial, konflik kepentingan antarpengurus, dan kejenuhan di tiap level.

Keadaan ini berdampak pada tingkat kepercayaan (trust) dalam melaksanakan program pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan, sebagai suatu proses, membutuhkan masyarakat yang kuat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, organisasi, baik di tingkat masyarakat maupun internal organisasi itu sendiri, perlu mampu mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada (Darwis et al., 2022).

Inovasi dan Tantangan dalam Program UP2K

Pelaksanaan Program UP2K menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan prinsip-prinsip pemberdayaan, terutama dalam aspek keberlanjutan dan inovasi. Tidak jelasnya sumber dana dan keterkaitan program dengan inisiatif pemerintah menjadi titik penting yang perlu diperbaiki. Transparansi dalam perencanaan program, dengan menyertakan rincian sumber daya finansial dan integrasi yang jelas dengan inisiatif pemerintah, dianggap sebagai langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan program dan kohesivitas dengan agenda pembangunan nasional.

Perhatian yang lebih besar juga perlu diberikan pada peran aktif kader PKK. Observasi menunjukkan bahwa anggota atau kader PKK seringkali lebih menjadi objek pelatihan daripada subjek yang dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Memberikan kesempatan kepada kader PKK untuk aktif terlibat dalam pengembangan program dan menggali potensi diri mereka tidak hanya akan meningkatkan partisipasi mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memberdayakan.

Program PKK juga dinilai kurang terintegrasi, didominasi oleh program-program yang bersifat repetitif tanpa adanya inovasi dan keberlanjutan yang memadai. Perubahan paradigma dalam perencanaan dan pelaksanaan program diperlukan agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat. Inovasi, baik dalam metodologi maupun substansi program, perlu menjadi fokus utama guna menjawab tantangan yang terus berkembang. Partisipasi masyarakat yang kurang optimal menjadi dampak dari kurangnya pemahaman mereka terhadap program PKK. Pelaksanaan yang sporadis dan kurangnya komunikasi efektif dapat merugikan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan komunikasi dan edukasi masyarakat untuk memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan manfaat dari program pemberdayaan ini.

Dukungan dan Kestinambungan Program

Meskipun demikian, Program UP2K tetap mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan. Dukungan ini mencerminkan keseriusan dan kepentingan dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh PKK. Dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari APBD/APBN/APBDesa, PKK memiliki landasan finansial yang kuat untuk melaksanakan kegiatan mereka. Melibatkan perangkat daerah dan lembaga lainnya dalam perumusan dan pelaksanaan program juga mencerminkan kolaborasi yang positif dan berkelanjutan. Kestinambungan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui PKK memerlukan upaya bersama dalam meningkatkan keberlanjutan, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan dukungan yang terus-menerus, evaluasi mendalam, dan peningkatan berkelanjutan, PKK dapat terus memberikan manfaat maksimal bagi keluarga Indonesia dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kewirausahaan memiliki peran sentral dalam membuka pintu menuju tujuan-tujuan penting seperti pengembangan usaha, inovasi, dan ekspresi kreativitas masyarakat dalam memajukan potensi-potensi yang dimiliki. Salah satu wujud konkret dari kewirausahaan adalah melalui pemberdayaan, yang bertujuan untuk memberikan kekuatan dan meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat yang mungkin kurang mampu atau tertinggal. Hal ini bertujuan agar mereka dapat melaksanakan program-program yang mengarah pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Inisiatif dalam masyarakat, seperti upaya mencari akses untuk pemberdayaan kewirausahaan, merupakan langkah konkret dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Pemberdayaan kewirausahaan memberikan daya dorong bagi masyarakat untuk menjadi agen perubahan, mengoptimalkan potensi ekonomi, dan meraih kesejahteraan dengan cara yang berkelanjutan.

Analisis hasil penelitian mengenai kewirausahaan sosial dalam Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan alternatif inovatif untuk memaksimalkan dampak positif dari kegiatan PKK. Integrasi antara aspek bisnis dengan tujuan sosial menciptakan solusi berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Definisi kewirausahaan sosial oleh (Hulgard, 2010) memberikan pandangan yang kaya terhadap konsep ini. Penciptaan nilai sosial, partisipasi masyarakat, inovasi sosial, dan aktivitas ekonomi diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam kewirausahaan sosial. Keterlibatan masyarakat sipil dalam mengatasi masalah sosial, pengembangan pendekatan baru, dan aktivitas ekonomi yang mendukung misi sosial menjadi fokus utama dalam konteks PKK.

Dengan menggabungkan nilai sosial dan kegiatan ekonomi, kewirausahaan sosial melalui PKK mampu mencapai dampak jangka panjang dan keberlanjutan dalam mencapai tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Integrasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Dengan demikian, kewirausahaan sosial di dalam konteks PKK tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan aspek ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial yang holistik.

Tantangan dan Peluang Implementasi Prinsip Kewirausahaan Sosial

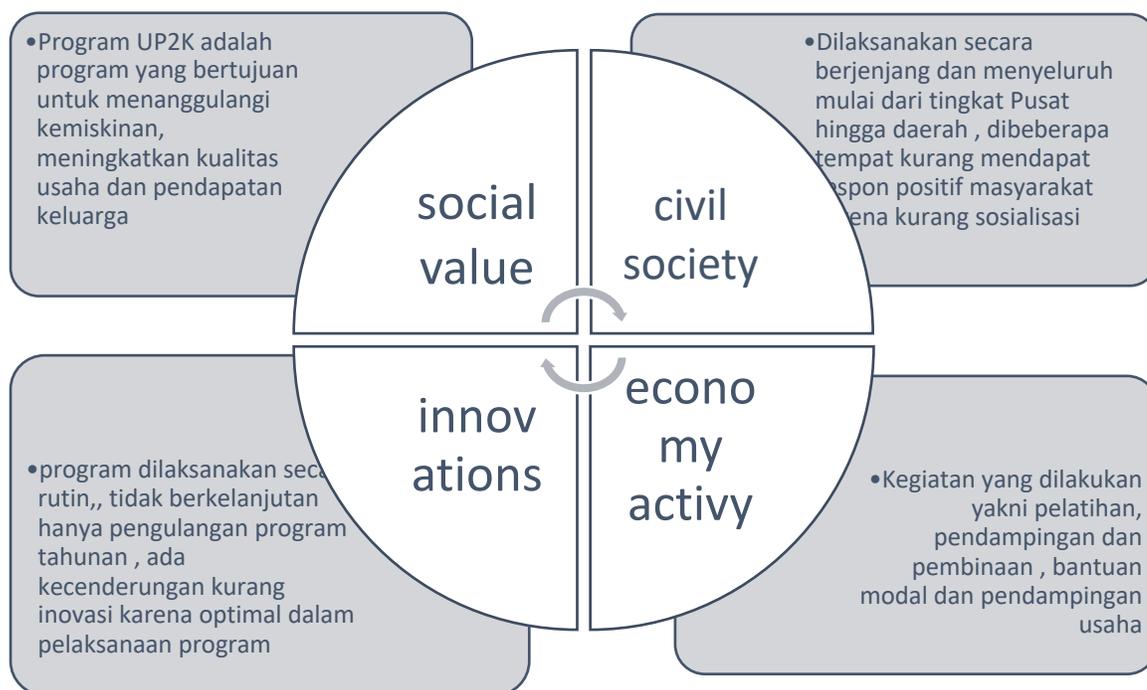
Pembahasan hasil literatur menyentuh berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam menerapkan prinsip kewirausahaan sosial dalam PKK. Tantangan tersebut mencakup kurangnya dukungan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Meski begitu, ada peluang signifikan dalam potensi pemberdayaan perempuan sebagai pendorong pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, PKK masih menghadapi kendala dalam sepenuhnya menerapkan prinsip pemberdayaan. Walaupun sudah bersifat *people-centered* dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, pelaksanaan program seringkali kurang berkelanjutan karena cenderung menjadi rutinitas pengulangan tanpa sinergi yang berkesinambungan. Konsep program PKK masih bersifat memenuhi kebutuhan dasar tanpa menyediakan mekanisme preventif terhadap masalah sosial secara berkelanjutan dan sistematis.

Namun demikian, PKK memiliki peluang besar untuk menerapkan prinsip wirausaha sosial, terutama karena mendapat dukungan dari pemerintah dan lembaga negara lainnya. Sebagai organisasi yang berakar dari kearifan lokal dan didukung oleh pimpinan daerah secara berjenjang, PKK seharusnya dapat mengatasi tantangan yang sering dihadapi oleh wirausaha sosial. Dukungan finansial, minimnya hambatan birokrasi, dan adanya jalur kolaboratif untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi kekuatan PKK dalam menerapkan prinsip kewirausahaan sosial.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan



Gambar 2. Semangat wirausaha sosial menurut (Hulgard, 2010) dalam Program PKK (UP2K)
Sumber: olahan penulis (2023)

Analisis literatur menyimpulkan bahwa Program Kerja Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat menjadi alat efektif untuk memberdayakan perekonomian keluarga jika diimplementasikan dengan prinsip kewirausahaan sosial. Terdapat kebutuhan untuk mengubah pandangan bahwa PKK hanya dapat dianggotai oleh perempuan, sementara pemberdayaan keluarga dapat melibatkan kedua jenis kelamin. Ini sangat penting terutama ketika banyak perempuan yang menjadi pemimpin daerah, sehingga sinergi antara kaum pria dan perempuan diperlukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang holistik.

Integrasi prinsip kewirausahaan sosial dalam PKK tidak hanya memperkaya dimensi ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi perlu diatasi melalui dukungan pemerintah, kerja sama sektor swasta, dan kesadaran akan manfaat jangka panjang yang dapat diciptakan oleh PKK berbasis kewirausahaan sosial.

Saran

Agar lebih mendalam memahami semangat wirausaha yang dimiliki oleh para kader PKK dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai bagian dari program Gerakan PKK, maka terdapat beberapa saran untuk penelitian berikutnya, antara lain pengembangan model pemberdayaan yang lebih terintegrasi dan terukur untuk pemberdayaan ekonomi keluarga melalui prinsip kewirausahaan sosial dalam PKK. Selain itu untuk penelitian berikutnya bisa melibatkan analisis gender yang lebih mendalam mengingat kader PKK sebagian besar adalah Perempuan sehingga dapat lebih memahami dampak pemberdayaan perempuan dalam konteks PKK, serta meningkatkan peran kaum pria dalam inisiatif ekonomi keluarga. Saran lainnya untuk penelitian selanjutnya, mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari penerapan prinsip kewirausahaan sosial dalam PKK secara lebih rinci, serta penelitian lebih mendalam dengan wawancara, mengingat tidak semua kegiatan PKK terdokumentasi secara maksimal di media atau situs web organisasi PKK.

Daftar Pustaka

- Amanah, S., Baliwati, Y. F., Khasanah, D. U., Apriwani, S., & Ramadhan, D. N. (2023). Kewirausahaan Sosial Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 539. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12353>
- Aslichati, L. (2011). Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.33830/jom.v7i1.77.2011>
- Darwis, R. S., Miranti, Y. S., Saffana, S. R., & Yuandina, S. (2022). Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.37495>
- Dees, J. G. (2001). *The Meaning of " Social Entrepreneurship ."* 1–5.
- Dinkominfo, B. I. (2022). *Gerakan PKK Menjadi Mitra Pemerintah Dalam Pembangunan.* <https://Banjarnegarakab.Go.Id/>. <https://banjarnegarakab.go.id/main/gerakan-pkk-menjadi-mitra-pemerintah-dalam-pembangunan/>
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat, & PKK, T. (2021). *Buku 2. Strategi Gerakan PKK.*
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1). <https://kominfo.jatimprov.go.id/>. (2023). *Wagub Emil: PKK Merupakan Organisasi Strategis Penggerak Masyarakat.* Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/wagub-emil-pkk-merupakan-organisasi-strategis-penggerak-masyarakat>

- Hulgard, L. (2010). Discourses of social entrepreneurship—Variations of the same theme? *EMES European Research Network*, 10, 1–21. http://base.socioeco.org/docs/wp_10-01_hulg_rd_web_.pdf%5Chttp://www.emes.net/site/wp-content/uploads/WP_10-01_Hulgaard_web_.pdf
- Khiftiyah, M., & Nilamsari, W. (2022). Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1024>
- Kriyantono, R. (2008). *TEKNIK PRAKTIS RISET KOMUNIKASI*. Kencana Prenada Media Grup.
- Listyorini, H. (2012). Komponen dan Dampak Social Entrepreneurship Dalam Upaya Revitalisasi Budaya dan Industri Batik Kabupaten Rembang. *Dinamika Kepariwisata*, 12(2), 45–57. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/pdk1/article/view/1720/634>
- Nabila, U., & Sonita, E. (2023). *EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA-PEMBERDAYAAN DAN*. 3, 65–79.
- Nurmasari, & Eka Komalasari. (2023). Peran Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Pada Era New Normal Di Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 16(1), 80–88. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.12412>